EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU)

T. Muhammad Rizky Nurfadani
NPP. 32.0177

Asdaf Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: tengku555@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mesy Faridah Hendiyani, S.STP.,MPA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Musrenbang (Development Planning Deliberation) is a strategic forum for channeling community aspirations and determining priority programs in the Regional Government Work Plan (RKPD). However, its implementation still faces challenges such as low community participation, limited capacity of village and sub-district officials, and suboptimal cross-sector coordination. These issues have led to negative public perceptions that development initiatives are often off-target and do not meet community expectations.* ***Purpose:*** *To determine the effectiveness of Musrenbang in increasing community participation in regional development planning in Indragiri Hilir Regency, Riau Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation. Informants consist of internal parties from Bappeda as facilitators of Musrenbang and community members as participants. The study applies the effectiveness theory by Gibson et al. (2005), which includes four indicators: productivity, efficiency, satisfaction, and adaptability.* ***Results/Findings:*** *Musrenbang is considered fairly effective in encouraging community participation, as evidenced by the number of community proposals that have been verified and realized in the RKPD. However, technical challenges, limited human resources, and weaknesses in information systems still persist.* ***Conclusion:*** *Musrenbang plays an important role in enhancing community involvement in development planning. To improve its effectiveness, technical aspects must be refined, the capacity of officials enhanced, and the e-Planning system and inter-sectoral coordination strengthened.*
Keywords*: Musrenbang, Effectiveness, Community Participation, Development Planning, Local Needs.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menetapkan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kecamatan, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Hal ini menimbulkan stigma negatif

terhadap pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ekspektasi masyarakat. **Tujuan** Untuk mengetahui efektivitas Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak internal Bappeda sebagai fasilitator Musrenbang dan masyarakat sebagai partisipan. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas dari Gibson et al. (2005) dengan empat indikator: produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadaptasian. **Hasil/Temuan**: Musrenbang dinilai cukup efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat, yang tercermin dari banyaknya usulan masyarakat yang terverifikasi dan terealisasi dalam RKPD. Namun, masih terdapat tantangan teknis serta keterbatasan SDM dan sistem informasi. **Kesimpulan** Musrenbang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan perbaikan pada aspek teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem e-Planning dan koordinasi lintas sektor.
Kata kunci: Musrenbang, Efektivitas, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Kebutuhan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan prinsip demokrasi yang tercermin dalam sistem politik yang mengedepankan partisipasi rakyat dan pemisahan kekuasaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan mulai dari demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi yang menekankan penguatan demokrasi dan otonomi daerah (Khansa, 2022). Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif. Sementara itu, fungsi legislatif diemban oleh DPR dan DPD yang bertugas menyusun undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (D, Rostyaningsih, 2012).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional (Y, Hayati, 2022). Musrenbang berfungsi untuk membahas dan menyepakati program prioritas dari usulan masyarakat di tingkat bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan pembangunan daerah (Mewengkang et al., 2021). Perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti dalam forum Musrenbang sangat penting untuk mewujudkan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan dan Panab (2022) bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah kunci agar kebijakan tidak bersifat top-down melainkan responsif terhadap kepentingan warga. Pelaksanaan Musrenbang menjadi sarana utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara langsung (Khansa, 2022), menjadikan masyarakat sebagai aktor utama

dalam keberhasilan pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya berbeda dengan perencanaan proyek biasa, karena melibatkan proses fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi oleh Bappeda agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik.

Pembangunan merupakan proses perubahan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia (Paselle, 2017). Hayati (2022) menegaskan bahwa efektivitas Musrenbang berbanding lurus dengan ketepatan sasaran pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara transparan, responsif, partisipatif, akuntabel, dan efisien. Artinya, Bappeda harus menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Di Kabupaten Indragiri Hilir, pembangunan daerah dilaksanakan melalui RPJMD yang mengacu pada RPJPD, sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023. Pelaksanaan Musrenbang menjadi titik strategis untuk menjamin partisipasi publik. Sebagai contoh, pelaksanaan Musrenbang untuk RKPD tahun 2024 melibatkan 172 peserta dari berbagai unsur, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah peserta Musrenbang rancangan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Peserta	Jumlah
PERANGKAT DAERAH	41
TOKOH MASYARAKAT	10
FORKOPIMDA/DPRD/PENGADILAN NEGERI & AGAMA	4
ORGANISASI/FORUM/LSM	10
ORGANISASI WANITA/INSTANSI VERTIKAL	20
BAPPEDALITBANG/PUPRPKPP PROVINSI	9
CAMAT/LURAH	30
PJ BUPATI & SEKDA/STAF AHLI/ASISTEN SEKDA	5
SEKOLAH/UNIVERSITAS/PERUSAHAAN	10
DPRD PROVINSI/BAPPEDA KABUPATEN TETANGGA	22
WAKIL PESERTA MUSRENBANG	11
TOTAL PESERTA	172

Sumber: Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, 2024

Berdasarkan data tersebut, partisipasi masyarakat memang sudah mulai melibatkan berbagai unsur, namun jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 197 dan 20 kecamatan yang ada, maka tingkat partisipasi masyarakat secara kuantitatif masih tergolong rendah. Hal ini menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan Musrenbang dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Gambar 1.
Alur Pelaksanaan Musrenbang

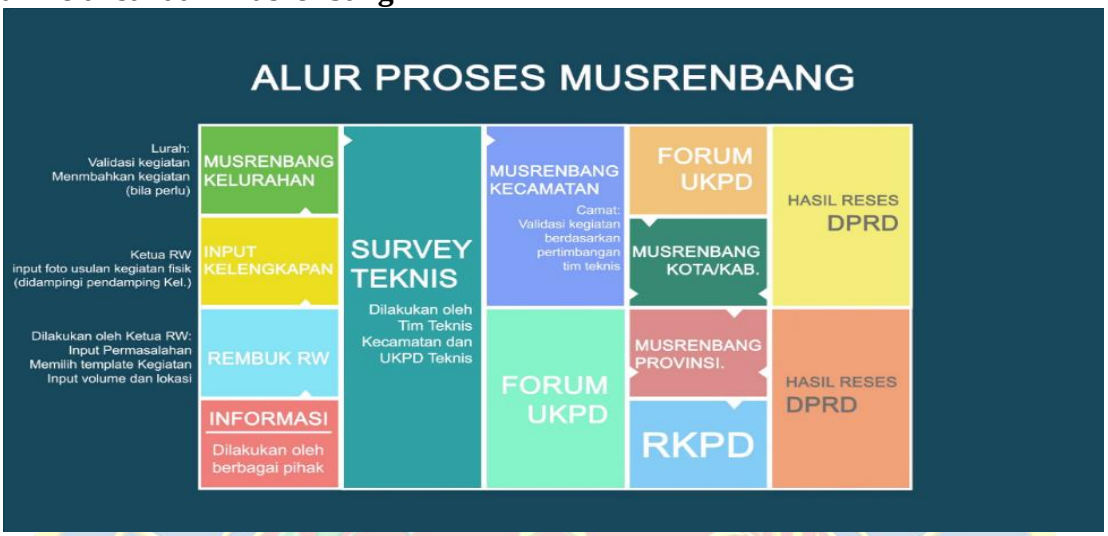

Sumber: https://bappeda.inhilkab.go.id/, diakses pada 25 November 2024

Gambar 1. menggambarkan tahapan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga provinsi. Alur ini menunjukkan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki peran dalam menyampaikan dan mengompilasi usulan pembangunan dari masyarakat. Proses ini menjadi kunci agar kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hilir, partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari data jumlah peserta Musrenbang yang tidak sebanding dengan jumlah desa dan kecamatan yang ada, serta keluhan masyarakat mengenai program pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan. Padahal, prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya ruang partisipatif bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam perencanaan kebijakan publik. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan Musrenbang, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat secara luas dan merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana Musrenbang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta bagaimana peran Bappeda sebagai fasilitator dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait efektivitas Musrenbang telah dilakukan di berbagai daerah dengan temuan yang beragam. Hayati (2022) menyoroti efektivitas Musrenbang melalui aplikasi e-Planning di Kecamatan Dumai Kota yang dinilai efisien namun masih menghadapi kendala teknis dan minimnya partisipasi stakeholder. Paselle (2017) menekankan bahwa

banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Muara Badak tidak terealisasi karena lemahnya seleksi aspirasi. Sementara itu, Nadira (2022) menemukan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen telah berjalan baik dan sesuai prosedur. Raudah et al. (2025) juga melihat partisipasi masyarakat cukup baik di Desa Pakacangan, meski masih terkendala anggaran dan kapasitas aparatur. Fauziah et al. (2024) mencatat partisipasi tinggi dalam Musrenbang di Medang Kampai, namun realisasi usulan masih rendah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Musrenbang telah membuka ruang partisipasi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat efektivitas Musrenbang secara spesifik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bagaimana peran Bappeda dalam pelaksanaannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokusnya pada efektivitas Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, daerah yang belum banyak dikaji dalam konteks ini. Berbeda dari studi sebelumnya yang dilakukan di wilayah lain, penelitian ini menyoroti dinamika lokal dan keterlibatan masyarakat secara langsung. Kebaruan juga tampak dari penggunaan teori efektivitas Gibson et al. (2005) dengan empat indikator utama produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadaptasian sebagai alat analisis. Melalui pendekatan kualitatif dan data lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan Musrenbang, baik dari sisi internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Bappeda, dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam menangkap makna, pandangan, dan persepsi dari informan terkait pelaksanaan Musrenbang serta menggambarkan fenomena sebagaimana adanya di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Gibson dan Woolcock (2008), yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan proses deliberatif dalam proyek partisipatif sebagai sumber kekuatan penyeimbang di tingkat lokal, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam operasionalisasi konsep, penelitian ini mengacu pada teori efektivitas dari Gibson et al. (2005) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu produktivitas, efisiensi,

kepuasan, dan keadaptasian. Keempat dimensi ini diterjemahkan ke dalam indikator yang relevan, seperti jumlah aspirasi masyarakat yang tersampaikan dan terealisasi, efektivitas tahapan dan waktu pelaksanaan Musrenbang, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses Musrenbang, serta kemampuan Bappeda dalam merespons perubahan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal. Konsep ini dipilih karena dapat menggambarkan efektivitas secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga proses pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari Bappeda sebagai penyelenggara Musrenbang dan masyarakat sebagai peserta. Narasumber menjadi sangat krusial, tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang akurat dan mampu memberikan informasi secara paripurna (Simangunsong, 2017). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan kegiatan, data statistik BPS, dan dokumen peraturan daerah. Penentuan informan dilakukan secara purposive untuk mendapatkan informasi yang relevan dan representatif. Sejalan dengan itu, Primastuti dan Li (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam Musrenbang sangat penting, meskipun pelaksanaannya masih minim pada beberapa wilayah, terutama dalam dimensi partisipatif dan penyusunan alokasi anggaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana proses Musrenbang berlangsung secara praktis dan apa saja tantangan maupun solusi yang muncul dari pelaksanaannya. Hasil analisis ini memperkaya pemahaman terhadap dinamika perencanaan partisipatif, seperti yang diungkapkan oleh Akbar et al. (2020), yang menemukan bahwa ketidaksesuaian antara praktik Musrenbang dan prinsip SDGs kerap terjadi akibat lemahnya integrasi pengetahuan lokal, konflik kepentingan, dan jadwal pelaksanaan yang tidak konsisten. Dengan demikian, metode dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas Musrenbang di tingkat daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Musrenbang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Studi Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir dan berhasil mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang kemudian peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasannya dengan sedemikian rupa dalam bentuk skripsi. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang memberikan dukungan yang sangat positif terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Adapun informan tersebut terdiri dari: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan, Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan, serta beberapa Tokoh Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Gibson et al(2005)menjelaskan terdapat empat indikator efektifitas yang menjadi

pedoman peneliti melakukan penelitian dengan permasalahan yang peneliti angkat terkait efektifitas musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Dimana keempat indikator tersebut adalah Produktifitas, Efisiensi, Kepuasan, dan Keadaptasian.

1. Produktifitas

Penilaian efektivitas Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari indikator produktivitas, yaitu sejauh mana aspirasi masyarakat berhasil disampaikan dan diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang disalurkan melalui forum Musrenbang. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Tuah Muhammad Syaifullah, MM, menyatakan bahwa Musrenbang menjadi wadah resmi untuk masyarakat menyampaikan usulan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kepala Bidang P3PD, H. Fihasrin, SE, M.Si, juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh sektor.

Lebih lanjut, Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan Bappeda, Andy Slamet, SE, MM, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan sangat bervariasi antar wilayah dan sektor, dan meskipun tidak semua dapat diakomodasi sekaligus, pemerintah selalu berupaya mendengarkan dan memprioritaskan yang paling mendesak sesuai anggaran yang tersedia. Berdasarkan data rekapitulasi aspirasi dalam Tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah usulan dari 20 kecamatan sangat signifikan, menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam forum Musrenbang.

Namun, tidak semua aspirasi yang disampaikan dapat langsung direalisasikan. Dalam pelaksanaannya, usulan tersebut harus melalui proses verifikasi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran. Kepala Bappeda menjelaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk dipertimbangkan untuk masuk ke dalam prioritas pembangunan tahunan. Bappeda memfasilitasi dan mengoordinasikan agar usulan dari tingkat desa dan kecamatan dapat diakomodasi dengan baik. Kepala Bidang P3PD, H. Fihasrin, menambahkan bahwa pemetaan usulan dilakukan agar aspirasi dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi untuk menjamin transparansi.

Tabel 2.
Rekap status aspirasi atau usulan dalam pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024

Status	Jumlah
Verifikasi Kecamatan	881
Verifikasi Perangkat Daerah	1231
Verifikasi TAPD	302
Dikembalikan	2044
Usulan Disetujui	1132
Validasi Mitra Bappeda	37
Dibatalkan	6
Pengajuan Usulan	690

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Diolah oleh Penulis, 2025)

Andy Slamet menyampaikan bahwa usulan yang tidak dapat diwujudkan sekaligus akan diprogramkan secara bertahap, dan Bappeda berupaya mencari pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan pihak ketiga atau program pusat. Tabel 2. menunjukkan status berbagai usulan dalam Musrenbang RKPD 2024, di mana 1.132 usulan telah disetujui, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses validasi, verifikasi, pengajuan, atau dikembalikan karena belum memenuhi syarat teknis. Bappeda juga aktif berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, dan mitra seperti pihak swasta untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aspirasi yang telah disetujui. Dengan demikian, pelaksanaan Musrenbang telah membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas, meskipun tantangan dalam verifikasi dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan yang perlu dikelola secara strategis.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi dalam pelaksanaan Musrenbang dapat dinilai dari dua aspek utama, yaitu tahapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Menurut Gibson et al. (2005), efisiensi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola input dan proses untuk menghasilkan output secara optimal. Dalam konteks Musrenbang, efisiensi ini tercermin dari seberapa baik proses perencanaan dilakukan secara sistematis dan sesuai jadwal. Tahapan Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari penyusunan rencana kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat, diikuti oleh pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Kepala Bappeda, Drs. Tuah Muhammad Syaifullah, menjelaskan bahwa proses ini dirancang untuk memastikan bahwa usulan masyarakat dikumpulkan dan dibahas secara berjenjang serta disesuaikan dengan visi misi pembangunan daerah dan kemampuan anggaran.

Kepala Bidang P3PD, H. Fihasrin, menambahkan bahwa tahapan ini disusun untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara maksimal dan berakhir dengan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Peran Bappeda sebagai fasilitator sangat penting dalam mengatur dan mengoordinasikan setiap tahapan agar berjalan efektif. Tabel 3. memuat rincian tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari input usulan dari kelurahan/desa, validasi, forum konsultasi, hingga penyusunan dan finalisasi RKPD melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Tabel ini mendukung pemahaman bahwa proses Musrenbang dirancang secara bertahap dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin efisiensi.

Tabel 3.
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahapan	Uraian
Input usulan Kelurahan/ Desa	-Kelurahan/Desa mem buat usulan sesuai prioritas daerah -Salinan usulan ditanda tangani Lurah/ Desa dikirim ke Bappeda
Validasi usulan Kelurahan/ Desa	-Validasi oleh Mitra Bappeda -Verifikasi lapangan atas usulan masya-rakat/lembaga dan Kalurahan

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Validasi oleh Kecamatan atas hasil Validasi Mitra Bappeda dan Kelurahan
Forum Konsultasi Publik	Berita Acara Kesepakatan
Input Usulan Pokir DPRD	Anggota DPRD membuat usulan berdasarkan hasil reses.
Validasi Usulan Pokir DPRD	-Validasi oleh Sekretariat DPRD -Validasi oleh Mitra Bappeda atas validasi Sekretariat DPRD
Forum Perangkat Daerah/ Forum Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah me-lakukan validasi usulan Kelurahan/Desa dan Pokir DPRD
Forum Gabungan Perangkat Daerah	Bappeda melakukan Forum Gabungan Perangkat Daerah
Input Renja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah input Ranwal Renja dalam SIPD.
Musrenbang RKPD Kabupaten	Materi Musrenbang merupakan hasil input dan validasi perangkat daerah
Input Rancangan Akhir	Perangkat Daerah input Ranhir Renja dalam SIPD
Input RKPD Final	Perangkat Daerah input Renja Final dalam SIPD

Sumber: https://bappeda.inhilkab.go.id/proses-perencanaan-dan-waktu-pengajuan/

Selain tahapan, efisiensi juga terlihat dari ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Musrenbang dilakukan secara rutin setiap tahun, dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan pada bulan Januari hingga Februari, lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten pada bulan Maret. Kepala Bappeda menjelaskan bahwa jadwal ini disusun agar sinkron dengan tahapan perencanaan nasional dan provinsi. Musrenbang tingkat kecamatan menjadi forum lanjutan untuk membahas usulan dari kelurahan, sedangkan Musrenbang kabupaten menjadi tahap final untuk menyaring usulan yang layak direalisasikan.

Kepala Bidang P3PD menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tabel 4. menyajikan jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir, yang menunjukkan pelaksanaannya berlangsung bertahap dalam rentang waktu Februari.

Tabel 4.
Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024 di seluruh Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Jadwal Pelaksanaan
Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas	Selasa, 7 Februari 2023
Tanah Merah, Enok, Reteh, Keritang	Rabu, 8 Februari 2023
Kuala Indragiri, Concong, Batang Tuaka, Gaung	Kamis, 9 Februari 2023
Gaung Anak Serka, Mandah, Kateman, Pelangiran	Selasa, 13 Februari 2023

Teluk Belengkong, Pulau Burung, Sungai Batang, Kemuning	Rabu, 14 Februari 2023

Sementara itu, Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dilaksanakan pada 21 Maret 2023. Jadwal ini menunjukkan bahwa seluruh proses telah dirancang agar berlangsung tepat waktu dan efisien, serta memberikan ruang partisipasi yang optimal kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

3. Kepuasan

Indikator kepuasan dalam teori efektivitas Gibson et al. (2005) mengukur sejauh mana hasil dari suatu program atau organisasi sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir, kepuasan masyarakat menjadi cerminan efektivitas pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat, transparansi, penyampaian informasi, pencapaian aspirasi, dan kualitas pelaksanaan secara keseluruhan. Penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang penting untuk mengetahui apakah forum ini benar-benar menjadi sarana partisipatif yang bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda, Rama Sandi, menyebutkan bahwa aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, transparansi, dan pencapaian aspirasi merupakan indikator yang selalu diperhatikan. Masyarakat pun memberikan respons positif terhadap pelaksanaan Musrenbang. Bapak Jauhari, salah satu warga, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sudah berjalan baik, di mana mereka diberi ruang menyampaikan aspirasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Henny, yang menilai pelaksanaan Musrenbang cukup transparan meskipun masih memerlukan perbaikan dalam penyampaian alasan atas usulan yang tidak diterima. Bapak Ferdian menilai sosialisasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang tidak aktif di media sosial atau tidak mengikuti pertemuan desa. Ia menyebut masih ada warga yang kurang mengetahui jadwal dan mekanisme penyampaian usulan.

Terkait pencapaian aspirasi, Bapak Novrian mengakui bahwa sebagian usulan masyarakat telah direalisasikan, namun beberapa lainnya belum ditindaklanjuti. Meski demikian, ia tetap menilai Musrenbang sebagai sarana yang efektif untuk mengangkat berbagai isu penting di masyarakat. Dari sisi kualitas pelaksanaan, Ibu Suhartini menilai Musrenbang cukup baik, terutama dalam memberi ruang partisipasi. Namun, ia menggarisbawahi adanya kendala dalam pemahaman bahasa saat sosialisasi yang dapat menghambat keterlibatan sebagian masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dinilai baik oleh masyarakat, mulai dari proses sosialisasi hingga realisasi sebagian aspirasi. Masyarakat merasakan manfaat dari forum ini sebagai media untuk menyampaikan kebutuhan mereka, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, termasuk melalui forum Musrenbang, merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Hendiyani (2019) bahwa inovasi dalam pelayanan publik berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan informasi dan kurang jelasnya tindak lanjut terhadap beberapa usulan. Hal ini perlu menjadi perhatian

Bappeda sebagai fasilitator agar pelaksanaan Musrenbang ke depan dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Keadaptasian

Indikator keadaptasian menurut Gibson et al. (2005) menunjukkan kemampuan suatu organisasi atau program kegiatan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, agar tetap relevan dan efektif. Dalam konteks Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir, keadaptasian dapat dilihat dari kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai fasilitator dalam menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif selama pelaksanaan Musrenbang. Kepala Bidang P3PD, H. Fihasrin, mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dan dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja, yang disebabkan oleh pemahaman teknis yang belum merata di tingkat kecamatan dan desa. Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan, Andy Slamet, menambahkan bahwa sinkronisasi data di internal Bappeda masih perlu ditingkatkan, dan tingginya volume usulan memerlukan sistem informasi yang lebih efisien. Sementara itu, Rama Sandi dari Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan menyebutkan perlunya peningkatan kapasitas SDM serta sistem digital yang lebih akurat dalam memantau dan menindaklanjuti usulan masyarakat, termasuk pentingnya memberikan umpan balik secara transparan.

Dari sisi eksternal, keadaptasian Bappeda dinilai dari seberapa baik mereka menanggapi masukan dan harapan masyarakat sebagai peserta Musrenbang. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun Musrenbang telah menjadi wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi awal seperti waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Bapak Ferdian menyampaikan bahwa masih banyak warga yang tidak mendapatkan informasi secara merata, sehingga partisipasi menjadi tidak maksimal. Selain itu, menurut Bapak Novrian, tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan kurang disosialisasikan kembali kepada masyarakat, sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan dari usulan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak internal Bappeda maupun masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan upaya adaptasi yang cukup baik, namun masih memerlukan sejumlah perbaikan agar lebih optimal. Dari sisi internal, peningkatan integrasi sistem informasi, pemahaman teknis perencanaan, serta mekanisme umpan balik perlu diperkuat. Sementara dari sisi eksternal, perlu adanya sosialisasi yang lebih merata dan transparansi terhadap hasil serta tindak lanjut Musrenbang. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus, Bappeda dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi Musrenbang sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Efektivitas Musrenbang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Studi Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam menyelesaikan penelitian mengenai efektivitas Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Musrenbang, yang diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung dari sisi internal mencakup struktur organisasi Bappeda yang

terorganisir dengan baik ke dalam tim kerja dan bidang fungsional, sehingga memudahkan koordinasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis usulan. Selain itu, adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah serta jajaran Bappeda turut memperkuat konsistensi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten. Dari sisi eksternal, partisipasi aktif Masyarakat termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga lokal, serta organisasi pemuda dan perempuan menjadi faktor penting yang mendorong relevansi usulan dengan kebutuhan lapangan. Dukungan perangkat desa dan kecamatan juga mempermudah koordinasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat bawah.

Di sisi lain, faktor penghambat juga ditemukan dalam pelaksanaan Musrenbang. Dari aspek internal, jadwal Musrenbang yang padat menyebabkan proses penjaringan dan verifikasi usulan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga menuntut kerja ekstra dari Bappeda untuk memverifikasi seluruh usulan secara maksimal. Selain itu, masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyampaikan data valid dan terkini juga menjadi kendala dalam menyusun rencana pembangunan yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hambatan eksternal juga cukup signifikan, antara lain kualitas usulan masyarakat yang sering kali tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah atau belum berbasis data teknis yang memadai, sehingga menyulitkan realisasi usulan tersebut. Di samping itu, terbatasnya kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam menyusun dan menyaring usulan juga mengakibatkan banyaknya usulan yang tumpang tindih dan tidak menunjukkan urgensi yang jelas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Musrenbang telah didukung oleh struktur internal organisasi yang solid dan partisipasi eksternal yang tinggi, namun tantangan dalam hal teknis, jadwal yang padat, serta kapasitas SDM di tingkat lokal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang ke depan, Bappeda perlu melakukan penguatan kapasitas internal, peningkatan kualitas sosialisasi dan pelatihan aparatur desa, serta perbaikan dalam sistem verifikasi dan penjadwalan agar seluruh proses dapat berjalan lebih efisien dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Musrenbang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Studi Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (studi pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir)", peneliti menganalisis berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang. Upaya ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu upaya internal dan eksternal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan Musrenbang.

Dari sisi internal, salah satu hambatan yang dihadapi adalah padatnya jadwal Musrenbang yang menyebabkan waktu penjaringan dan verifikasi usulan menjadi sangat terbatas. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda melakukan rapat evaluasi khusus untuk membahas penjadwalan kegiatan Musrenbang agar pada pelaksanaan berikutnya seluruh usulan dari masyarakat dapat terverifikasi secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewat. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi perhatian utama. Evaluasi dilakukan bersama perangkat daerah lain guna memperkuat sinergi dan memastikan rencana pembangunan dapat disusun dengan baik berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Kesimpulannya, pelaksanaan rapat evaluasi menjadi langkah strategis dan penting dalam mengatasi hambatan internal, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di masa mendatang.

Sementara itu, dari sisi eksternal, Bappeda juga menghadapi tantangan dalam hal kualitas usulan masyarakat yang masih sering tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Untuk itu, telah dilakukan sosialisasi guna memberi pemahaman kepada masyarakat terkait cara penyampaian usulan yang benar, termasuk kelengkapan data dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah. Namun demikian, masih ditemukan bahwa sebagian masyarakat mengabaikan informasi teknis yang telah disampaikan. Oleh karena itu, Bappeda juga menyelenggarakan pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur di desa dan kecamatan agar mereka mampu menyusun dan menyaring usulan masyarakat secara lebih baik. Pendampingan tetap dilakukan oleh Bappeda sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan dapat berjalan lancar dan sesuai harapan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmennya dalam mengatasi hambatan yang muncul, baik dari sisi internal maupun eksternal. Rangkaian kegiatan seperti evaluasi internal, sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan teknis bagi aparatur daerah merupakan langkah konkret yang mendukung perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Musrenbang, sehingga ke depan proses perencanaan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, partisipatif, dan tepat sasaran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah aspirasi yang disampaikan dan diverifikasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam forum Musrenbang, meskipun masih dihadapkan pada tantangan koordinasi internal dan teknis verifikasi usulan. Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Sujianto, dan Adianto (2024) di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang cukup tinggi dan menjadi faktor kunci keberhasilan program, meskipun masih terkendala dari sisi teknis pengolahan dan validasi data usulan. Sama halnya dengan temuan Hayati (2022), penelitian ini juga menegaskan bahwa struktur organisasi yang jelas serta dukungan penuh dari pimpinan daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran Musrenbang. Hayati (2022) dalam penelitiannya di Kecamatan Dumai Kota menemukan bahwa penerapan sistem digital seperti e-Planning cukup membantu, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya integrasi data dan belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem. Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian Nadira (2022) di Gampong Ajuen, yang menyatakan rendahnya efektivitas Musrenbang disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat dan dominasi kelompok elit lokal, di Kabupaten Indragiri Hilir masyarakat cenderung aktif terlibat, meskipun penyampaian informasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Paselle (2017), yang menekankan pentingnya peran perangkat desa dan kecamatan sebagai penghubung antara masyarakat dan perencana di tingkat kabupaten. Hal serupa ditemukan di Indragiri Hilir, di mana dukungan dari perangkat tingkat bawah sangat membantu dalam mengoordinasikan

pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa hingga kabupaten. Berbeda dengan penelitian Raudah, Jumadi, dan Herlinda (2025) yang menemukan rendahnya kapasitas aparatur desa sebagai kendala utama dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Indragiri Hilir telah dilakukan pelatihan teknis dan pendampingan oleh Bappeda untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa, meskipun implementasinya belum merata di semua wilayah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Indragiri Hilir sudah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah aspirasi yang disampaikan dan diverifikasi dalam forum Musrenbang serta beberapa usulan yang telah direalisasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Efektivitas ini didukung oleh indikator produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadaptasian sebagaimana dirumuskan oleh Gibson et al. (2005). Namun demikian, partisipasi masyarakat masih terkendala oleh terbatasnya kapasitas aparatur, ketimpangan informasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak partisipatif, serta masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Planning. Peran Bappeda sebagai fasilitator sangat penting, terutama dalam menyosialisasikan program, melakukan pendampingan teknis, dan mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta perluasan pelibatan masyarakat secara inklusif guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. **Keterbatasan penelitian ini,** Fokus wilayah hanya pada Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan sangat bergantung pada subjektivitas informan, sehingga berpotensi menimbulkan bias. Penelitian ini juga belum mendalami peran teknologi informasi seperti e-Planning secara detail, serta keterlibatan masyarakat yang dijadikan informan masih terbatas dan belum mencakup semua lapisan, khususnya kelompok rentan. **Arah masa depan penelitian** ini Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara komparatif di beberapa daerah agar menghasilkan temuan yang lebih luas. Penggunaan metode campuran (mixed methods) juga dapat memperkaya hasil penelitian dengan data yang lebih kuantitatif dan objektif. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai peran teknologi digital dalam mendukung Musrenbang, serta memperluas fokus partisipasi masyarakat terhadap kelompok yang selama ini kurang terlibat, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir atas dukungan dan data yang diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan, perangkat daerah, dan peserta Musrenbang yang telah berpartisipasi. Penghargaan khusus ditujukan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan motivasi yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan dan semangatnya hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aditya Bagas Pangestu, et al. 2024. E-Governance and Development Planning: Case Study of Bandung City. Vol 3 No. 2 Social Impact Journal. https://doi.org/10.61391/sij.v3i2.167

Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development, 51*(3), 243–260. https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822

E Panelle, 2017. Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmiah, 7(2), 15-19 https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.339

Fauziah, F., Sujianto, S., & Adianto, A. (2024). Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(1), 2429–2445. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7842

Gibson, C., & Woolcock, M. (2008). Empowerment, deliberative development, and local-level politics in Indonesia: Participatory projects as a source of countervailing power. *Studies in Comparative International Development, 43*(2), 151–180. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9021-0

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2005). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses* (Edisi kedelapan, terj.). Jakarta: Binarupa Aksara.

Dahliah, 2022. Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene, Jurnal Manajemen, 5(3), 15-18 https://doi.org/10.37531/yum.v5i3.4166

I, Sakti. 2023. Governance of the National Development Planning and Budgeting Synchronization Network. JOURNAL LA SOCIALE. VOL. 04, ISSUE 05 (363-371) 10.37899/journal-la-sociale.v4i5.915

Khansa, A. (2022). *Perencanaan pembangunan partisipatif guna mewujudkan aspirasi masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9697

Y, Hayati, 2022. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E- Planning Di Kantor Kecamatan Dumai Kota. Jurnal Niara, 1(1), 8-16. https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7391

Wiguna, W. 2018. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijuengjing Kabupaten Ciamis, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 16-20 http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1814

Primastuti, S. K., & Li, Y. (2018). Evaluating development planning deliberation (the Musrenbang) as a participatory budgeting practice in Indonesia: A case of Batu City Government, East Java Province. *Reports of the City Planning Institute of Japan, 17*(2), 223–226. https://doi.org/10.11361/reportscpij.17.2_223

Raudah, S., Jumadi, J., & Herlinda, S. A. A. (2025). Efektivitas pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam perencanaan pembangunan daerah di

Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)*, *1*(2), 73–79. https://doi.org/10.36658/jsnmr390

Sugiartha, I. M., Supriatna, T., Sartika, I., & Tahir, M. I. (2023). Collaborative Governance in Local Development Planning for Annual Local Work Planning in Karangasem Regency, Bali, Indonesia. International Journal of Economics Development Research (IJEDR), 4(2), 1072–1084. https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i3.3516

Ridwan, R., & Panab, J. (2022). Perencanaan pembangunan partisipatif guna mewujudkan aspirasi masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, *4*(2), 125–131. https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3065

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.